

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, H., Sumantri, J., & Djunaedi, P. (2021). *Modul Pengelolaan Kas Negara* (R. Widodo & S. Adhitama (eds.)). Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- DJPB. (2017). *Treasury Knowledge Digest: All behind the strategic policies*.
- Effendi, R. (2013). *Accounting Principles: Prinsip-prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP* (Ed. Revisi, Cet. 3). Rajawali Pers.
- Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB. (2021). *Profil Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020* (S. Anam, I. Karyanto, & Suroto (eds.)).
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2014). *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 14 Tentang Akuntansi Kas*.
- Martani, D., Siregar, S. V., Wardhani, R., Farahmita, A., & Tanujaya, E. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Salemba Empat.
- Murwanto, R., Insyafiah, & Subkhan. (2006). *Manajemen Kas Sektor Publik*. Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). <http://www.bppk.depkeu.go.id>
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, (2020).
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2020 tentang

Perubahan Keenam atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020, (2020).

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, (2020).

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, (2014).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2003).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (2004).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, (2007).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (2014).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (2020).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, (2020).

Puspasari, R. (2020, April 17). *Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-waspada-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-indonesia/>

Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif*. 17(33).  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.